

af

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA MUSEUM MANUSIA PURBA KLASER DAYU
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Halisa Maulana Harum Trisakti, Dyah Lituhayu

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Museum Manusia Purba Klaster Dayu (Museum Dayu) is a cultural heritage tourism destination located in Karanganyar Regency, classified as a Regency Strategic Tourism Area (KSPK) and recognized as part of the UNESCO World Heritage Site of Sangiran. Despite its considerable cultural and educational value, the museum's visitor numbers and tourism revenue remain relatively low compared to other tourism objects in the region. This study aims to analyze the roles of stakeholders in the development of Museum Dayu and to identify the driving and inhibiting factors that influence those roles. Using a descriptive qualitative research method, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving nine key informants. The results indicate that stakeholder roles were carried out by fourteen actors divided into five categories: policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. The Museum dan Cagar Budaya (MCB) acts as the leading sector supported by Disparpora Karanganyar Regency. The driving factors include institutional commitment between stakeholders, regulatory support, and institutional recognition from UNESCO and national agencies. The inhibiting factors include limited innovation and initiative of the museum's human resources, budget constraints for events and promotion, low community participation, and minimal involvement of the private sector. This study recommends strengthening multi-stakeholder synergy, intensifying digital promotion, and expanding private sector partnerships to enhance the museum's development.

Keywords: *Stakeholders, Role of Stakeholders, Tourism Development, Museum Dayu, Karanganyar Regency*

ABSTRAK

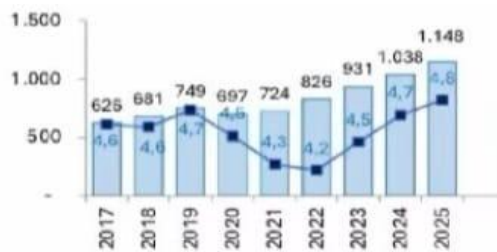
Museum Manusia Purba Klaster Dayu (Museum Dayu) merupakan destinasi wisata cagar budaya yang terletak di Kabupaten Karanganyar, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), dan diakui sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia UNESCO di Kawasan Sangiran. Meskipun memiliki nilai edukatif dan kebudayaan yang tinggi, jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan dari objek wisata ini masih relatif rendah dibandingkan objek wisata lain di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan Museum Dayu serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi peran tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan sembilan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholders* dijalankan oleh empat belas aktor yang terbagi dalam lima kategori, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator. Museum dan Cagar Budaya (MCB) berkedudukan sebagai *leading sector* yang didukung oleh Disparpora Kabupaten Karanganyar. Faktor pendorong meliputi komitmen kelembagaan antar *stakeholders*, dukungan regulasi pemerintah, serta pengakuan dari UNESCO dan lembaga nasional. Faktor penghambat mencakup keterbatasan inovasi dan inisiatif SDM pengelola, keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan event dan promosi wisata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya keterlibatan sektor swasta. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, intensifikasi promosi wisata digital, serta perluasan kemitraan dengan sektor swasta guna meningkatkan pengembangan objek wisata Museum Dayu secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Stakeholders*, Peran *Stakeholders*, Pengembangan Pariwisata, Museum Dayu, Kabupaten Karanganyar

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dewasa ini menjadi salah satu sumber penyumbang devisa dan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (Yakub dkk., 2019). Di Indonesia, pariwisata berperan sebagai *leading sector* yang berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. Kontribusi PDB Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2017-2025 (dalam Rupiah Triliun)



Sumber : Pusdatin Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, (Data diolah, 2026)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 4,6% pada tahun 2017 hingga mencapai 4,8% pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami kontraksi pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Sektor Pariwisata Jateng Tahun 2021-2025

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah Total Wisatawan
2021	21.332.409	1.793	21.334.202
2022	46.465.437	144.691	46.610.128
2023	56.485.087	464.719	56.949.806
2024	68.887.558	593.168	69.480.726
2025	73.821.257	624.956	74.446.231

Sumber : Diolah dari BPS Provinsi Jateng, 2026

Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat, dari 21,3 juta wisatawan pada tahun 2021 menjadi 74,4 juta wisatawan pada tahun 2025.

Tabel 2. Kab/Kota dengan Jumlah Perjalanan Wisnus Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah Menurut Tujuan Wisata Per Triwulan III Tahun 2025 (Agustus-Oktober)

No	Kab/Kota	Jumlah Perjalanan	Persentase (%)
1	Kota Semarang	1.095.400	9,63%
2	Kota Surakarta	686.460	6,04%
3	Kab. Banyumas	567.880	4,99%
4	Kab. Karanganyar	524.030	4,61%
5	Kab. Semarang	503.960	4,43%

Sumber : Diolah dari BPS Provinsi Jateng, 2026

Kabupaten Karanganyar, sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, menempati peringkat keempat dari 35 kabupaten/kota dalam hal jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada Triwulan III Tahun 2025 dengan total sebanyak 524.030 ribu wisatawan atau 4,61% dari total perjalanan wisatawan Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar yang memiliki nilai strategis adalah Museum Manusia Purba Klaster Dayu, atau lebih dikenal sebagai Museum Dayu. Museum ini merupakan destinasi wisata berbentuk cagar budaya yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016. Museum Dayu dibangun sejak tahun

2013 dan diresmikan pada 19 Oktober 2014 oleh Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia. Museum ini menampilkan fosil manusia purba Homo Erectus tipe tipik, artefak in-situ pada formasi Pucangan, serta merupakan bagian dari Situs Sangiran yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO.

Tabel 3. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada Objek Wisata yang dikelola Disparpora Kab. Karanganyar Tahun 2021-2025

No	Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan					Total
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Air Terjun Jumog	81.757	297.332	0	397.744	351.235	1.128.068
2	Grojogan Sewu	154.317	236.373	216.044	169.402	131.650	907.786
3	Candi Cetho	55.716	110.018	110.044	83.663	67.262	426.703
4	Perhutani	6.396	7.699	8.077	24.322	60.835	107.329
5	New Balekambang	19.508	36.102	16.179	8.849	0	80.638
6	Candi Sukuh	4.526	18.545	20.012	18.186	15.911	77.180
7	Parang Ijo	10.312	8.661	10.906	4.788	3.673	38.340
8	Museum Dayu	2.058	6.483	4.687	7.769	10.981	31.978
9	Saraswati	3.855	5.740	6.660	4.416	4.198	24.869
10	Sapta Tirta Pablengan	2.002	2.319	2.530	1.925	1.801	10.577

Sumber: Diolah dari BPS Kab. Karanganyar, 2026

Meskipun memiliki nilai historis dan edukatif yang tinggi, kinerja Museum Dayu dalam aspek kunjungan wisatawan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Berdasarkan data Disparpora Kabupaten Karanganyar, jumlah kunjungan Museum Dayu hanya mencapai 10.981 wisatawan pada tahun 2025, jauh di bawah objek wisata lain seperti Air Terjun Jumog (351.235 wisatawan) maupun Grojogan Sewu (131.650 wisatawan). Total pendapatan Museum Dayu selama periode 2021-2025 hanya sebesar Rp159.890.000, menempatkannya pada peringkat kesembilan dari sepuluh objek wisata yang dikelola Disparpora Kab. Karanganyar.

Tabel 4 Data Pendapatan Objek Wisata yang dikelola Disparpora Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025 dalam Rupiah (Rp)

No	Objek Wisata	Pendapatan dalam Rupiah (Rp)					Total
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Grojogan Sewu	3.394.974.000	5.200.206.000	4.752.968.000	4.573.854.000	3.554.550.000	21.476.552.000
2	Air Terjun Jumog	408.785.000	4.459.980.000	0	7.954.880.000	7.024.700.000	19.848.345.000
3	Candi Cetho	557.160.000	1.100.180.000	1.100.440.000	1.254.945.000	1.008.930.000	4.520.211.000
4	Perhutani	95.940.000	115.485.000	121.155.000	486.440.000	1.216.700.000	2.035.720.000
5	New Balekambang	390.160.000	722.040.000	323.580.000	176.980.000	0	1.612.760.000
6	Candi Sukuh	45.260.000	370.900.000	400.240.000	272.790.000	238.665.000	1.327.855.000
7	Parang Ijo	51.560.000	43.305.000	54.530.000	47.880.000	36.730.000	234.005.000
8	Saraswati	26.985.000	40.180.000	46.620.000	30.912.000	29.386.000	174.083.000
9	Museum Dayu	10.290.000	32.435.000	23.435.000	38.845.000	54.905.000	159.890.000
10	Sapta Tirta Pablengan	10.110.000	16.233.000	17.710.000	25.025.000	23.413.000	92.491.000

Sumber: Diolah dari BPS Kab. Karanganyar, 2026

Kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah permasalahan yang melibatkan peran para pemangku kepentingan (stakeholders). Penelitian di lapangan menemukan sejumlah permasalahan yang ada dalam pengembangan Museum Dayu, seperti penyediaan fasilitas dasar wisata belum memadai, lemahnya promosi digital serta keterbatasan fasilitas pendukung wisata yang disediakan oleh Disparpora Kabupaten Karanganyar sebagai pengelola pendukung. Selain itu, keterlibatan sektor swasta masih minim dan baru dimulai pada bulan Agustus 2025 melalui kerja sama pameran bersama dengan Museum De Tjolomadoe, serta partisipasi masyarakat lokal masih terbatas pada kegiatan perdagangan dan kesenian.

Gambar 2. Kondisi Fasilitas Dasar Wisata yang Tidak Berfungsi di Museum Dayu



Sumber: Dokumen pribadi peneliti, 2026

Pentingnya keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal 5 menyebutkan penyelenggaraan pariwisata harus berlandaskan pada prinsip keterpaduan lintas sektor, antar wilayah, serta antara pusat dan daerah. Sejalan dengan pasal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 menegaskan bahwa pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) di Kabupaten Karanganyar diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan: Mengapa peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu di Kabupaten Karanganyar masih belum optimal? Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan Museum Dayu, dan (2) mengidentifikasi faktor pendorong serta penghambat peran *stakeholders* tersebut.

KAJIAN TEORI

Teori *Stakeholders*

Stakeholders adalah individu maupun organisasi yang memiliki

pengaruh atau terdampak, baik positif maupun negatif, dari suatu kegiatan, program atau tujuan organisasi (Talib dalam Rintawati & Santoso, 2024). Rhenald dalam Langrafe dkk., (2020) menerangkan *stakeholders* sebagai individu atau kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang peran serta fungsinya dapat menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, terdapat tiga *stakeholders* utama yang memiliki peran masing-masing, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pentingnya keterlibatan *stakeholders* sejalan dengan pendapat Wanner dalam Rintawati & Santoso (2024) yang menegaskan peran mereka dapat menghasilkan perencanaan pariwisata yang baik, meminimalkan potensi konflik, serta menyatukan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran *Stakeholders*

Nugroho (2014), mengklasifikasikan peran *stakeholders* berdasarkan fungsinya dalam suatu program, antara lain:

1. ***Policy Creator***, merupakan *stakeholders* yang memiliki wewenang dalam menentukan keputusan dan kebijakan yang akan diambil pada suatu program pengembangan

pariwisata, mencakup perumusan regulasi, penetapan lokasi pengembangan, penetapan nilai kompensasi, serta penerbitan peraturan terkait pembangunan objek wisata.

2. Koordinator, merupakan *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan program pengembangan pariwisata, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

3. Fasilitator, adalah *stakeholders* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan kelompok sasaran, baik berupa anggaran, fasilitas dasar wisata, sarana prasarana pendukung, maupun program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Implementator, merupakan *stakeholders* yang berperan menjalankan kebijakan kepada kelompok sasaran melalui serangkaian kegiatan operasional, administratif, dokumentatif, dan konstruktif.

5. Akselerator, merupakan *stakeholders* yang berperan mempercepat dan meningkatkan efisiensi implementasi suatu program atau kebijakan, meskipun tidak selalu memiliki kepentingan langsung maupun pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan proses yang dilakukan secara bertahap untuk menciptakan pariwisata yang lebih baik di masa depan dengan tujuan meningkatkan minat wisatawan melalui peningkatan kualitas destinasi wisata (Nur dkk., dalam Rintawati & Santoso, 2024). Keberhasilan pengembangan pariwisata tidak dapat mengandalkan satu *stakeholders* saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat (Destiana dkk., 2020).

Collaborative Governance

Collaborative governance adalah suatu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memfasilitasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari latar belakang yang beragam dalam proses deliberasi dan pengambilan keputusan bersama, termasuk pelibatan aktor-aktor non-negara sebagai bagian integral dari mekanisme perumusan kebijakan kolektif yang diarahkan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah serta mengelola program-program maupun aset-aset publik secara bersama-sama (Ansell & Gash, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian adalah Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu, Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sembilan narasumber, yaitu: Fungsionaris Ahli Madya Bidang Destinasi Wisata Disparpora Kabupaten Karanganyar, Penanggung Jawab Unit Klaster Museum Dayu, Petugas Locket Museum Dayu, Sekretaris Pemerintah Desa Dayu, Pengurus Pokdarwis Dayu, dua orang Pedagang Museum Dayu, serta dua orang Wisatawan Lokal Museum Dayu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat empat belas *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu di Kabupaten Karanganyar. *Stakeholders* tersebut menjalankan lima peran berdasarkan teori Nugroho (2014), yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.

1. *Policy Creator*

Policy creator merupakan *stakeholders* yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan dan kebijakan pada suatu program pengembangan pariwisata. Dalam konteks pengembangan Museum Dayu, peran ini dijalankan oleh Museum dan Cagar Budaya (MCB) selaku unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan didukung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar.

MCB berkedudukan sebagai *leading sector* yang memiliki legitimasi kelembagaan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan kawasan wisata, sementara Disparpora berperan sebagai mitra koordinatif di

tingkat daerah. Keduanya menjalankan empat indikator peran *policy creator* menurut Nugroho (2014), yaitu: (1) merumuskan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata; (2) menentukan lokasi untuk pengembangan objek wisata; (3) menetapkan nilai kompensasi atau ganti rugi; serta (4) menetapkan peraturan terkait pembangunan lokasi wisata.

Dalam perumusan regulasi, setiap kebijakan pengembangan Museum Dayu mengacu pada hierarki regulasi, yakni kebijakan Kementerian Kebudayaan sebagai acuan utama, diikuti regulasi tingkat kabupaten. Hal ini dikarenakan Museum Dayu merupakan bagian dari Situs Sangiran yang diakui oleh UNESCO dan berstatus cagar budaya nasional.

Penetapan zonasi kawasan yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan kepentingan pelestarian situs cagar budaya dan hak ekonomi masyarakat lokal selaku pemilik lahan. Secara keseluruhan, peran *policy creator* telah berjalan sesuai keempat indikator Nugroho (2014), dengan fokus utama pada harmonisasi antara kepentingan pelestarian cagar budaya nasional dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

2. Koordinator

Koordinator merupakan *stakeholders* yang berperan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan program pengembangan pariwisata mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Peran ini secara dominan diemban oleh MCB bersama Disparpora Kabupaten Karanganyar, dengan Pemerintah Desa Dayu sebagai peserta aktif dalam forum-forum koordinasi.

Pada indikator pertama, MCB bersama Disparpora secara rutin menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) minimal dua kali dalam setahun yang melibatkan Pemerintah Desa Dayu dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Proses koordinasi dalam pengembangan Museum Dayu tidak hanya bersifat *top-down* semata, melainkan berupaya mengintegrasikan suara dari tingkat lokal melalui forum-forum koordinasi yang diselenggarakan secara berkala. Terdapat pembagian tanggung jawab yang terdefinisi secara jelas: MCB bertanggung jawab atas aktivitas di kawasan dalam museum, sedangkan Disparpora mengemban tanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan

fasilitas di kawasan luar museum. Komitmen untuk selalu melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja mencerminkan orientasi pemberdayaan ekonomi yang tidak terpisahkan dari pengembangan objek wisata.

3. Fasilitator

Fasilitator merupakan *stakeholders* yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai kebutuhan kelompok sasaran, baik berupa anggaran, fasilitas dasar wisata, perawatan dan pembangunan fasilitas objek wisata, maupun program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peran fasilitator dalam pengembangan Museum Dayu dijalankan oleh MCB sebagai fasilitator utama, dan didukung oleh Disarpورا Kabupaten Karanganyar serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karanganyar.

Pada indikator penyediaan anggaran, MCB mengandalkan dana APBN untuk membiayai operasional kawasan dalam museum, sementara Disarpورا Kabupaten Karanganyar menyediakan pembiayaan melalui APBD. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara biaya operasional dan pendapatan Museum Dayu.

Pada aspek penyediaan fasilitas, MCB bertanggung jawab atas seluruh

fasilitas di kawasan dalam museum, meliputi *Tourist Information Center* (TIC), lobby, mushola, toilet, gazebo, ruang diorama, ruang display, taman bermain anak, kebun binatang mini, hingga papan informasi wisata.

Sementara Disarpورا menangani penyediaan lahan bangunan, lahan parkir, dan papan penunjuk pariwisata. Pada aspek perawatan fasilitas, kondisi Museum Dayu yang telah berdiri lebih dari 12 tahun memerlukan revitalisasi besar yang hingga saat penelitian dilakukan masih menunggu pencairan anggaran dari pemerintah meskipun telah diajukan sejak tahun 2023. Kondisi ini diperparah oleh peran DLH Kabupaten Karanganyar yang belum berjalan efektif sesuai kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pengelolaan sampah di kawasan museum.

Pada aspek program pelatihan dan pemberdayaan, MCB telah menyelenggarakan pelatihan Bahasa Inggris, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pelayanan pengunjung difabel bagi pegawai, sekaligus melibatkan tenaga kerja lokal dalam kegiatan ekskavasi dan pelatihan pemandu wisata lokal. Adapun Disarpورا menyelenggarakan pembinaan sapta pesona, pembentukan Pokdarwis, dan pelatihan umkm. Namun demikian, dampak dari program-program tersebut belum signifikan terhadap peningkatan

kunjungan wisatawan, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan program pelatihan semata tidak cukup tanpa disertai motivasi dan kapasitas implementasi yang memadai dari kelompok sasaran.

4. Implementator

Implementator merupakan *stakeholders* yang berperan menjalankan kebijakan atau program kepada kelompok sasaran melalui serangkaian kegiatan operasional. Dalam pengembangan Museum Dayu, peran implementator dijalankan oleh tiga *stakeholders*, yakni MCB melalui Unit Klaster Museum Dayu sebagai lembaga pengelola induk, Unit Klaster Museum Dayu sebagai satuan pengelola operasional di tingkat objek wisata, serta Petugas Loker selaku pelaksana layanan kunjungan harian.

Berdasarkan lima indikator peran implementator menurut Nugroho (2014), MCB melalui Unit Klaster Museum Dayu merupakan *stakeholders* yang paling dominan. Hal ini tercermin dari cakupan tanggung jawabnya yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi aset fisik dan legal, pengelolaan operasional harian, pendokumentasian program, hingga pengawasan pembangunan konstruksi. Unit Klaster Museum Dayu juga aktif berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan tidak

ada tumpang tindih batas lahan, sekaligus memverifikasi kesesuaian rencana pengembangan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar.

Namun demikian, pada aspek penyediaan media informasi dan promosi wisata, implementasi masih ditemukan belum optimal. Meskipun MCB telah memiliki platform media sosial yang terintegrasi dalam akun @sangirankita serta Disparpora Kabupaten Karanganyar memiliki akun *instagram* dan *facebook*, frekuensi pembaruan konten yang tidak konsisten berdampak pada minimnya jangkauan informasi kepada calon wisatawan. Kedua wisatawan lokal yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan mengetahui keberadaan Museum Dayu bukan melalui media sosial, melainkan dari papan penanda fisik di sekitar lokasi objek wisata Museum Dayu dan komunikasi dari mulut ke mulut.

5. Akselerator

Akselerator merupakan *stakeholders* yang berperan mempercepat dan meningkatkan efisiensi implementasi suatu program meskipun tidak selalu memiliki kepentingan langsung maupun pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengembangan Museum Dayu, peran akselerator dijalankan oleh Pemerintah Desa Dayu,

PT. Sinergi Colomadu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karanganyar, Pokdarwis Dayu, Karang Taruna Desa Dayu, Kelompok Kesenian Tari Purba, pedagang museum, pelaku umkm sekitar, dan wisatawan lokal.

Pemerintah Desa Dayu menjalankan peran akselerator melalui inisiasi pembentukan kelompok kesenian lokal "Tari Purba" yang digerakkan oleh ibu-ibu PKK, serta penyelenggaraan program pelatihan bagi masyarakat Desa Dayu, termasuk pelatihan percetakan kaos yang bertujuan mendorong hadirnya usaha souvenir di kawasan objek wisata Museum Dayu. PT. Sinergi Colomadu dan PHRI Karanganyar berkontribusi melalui kolaborasi promosi wisata digital dan kegiatan pameran bersama antara Museum Dayu dan Museum De Tjolomadoe yang telah diformalkan melalui *Memorandum of Understanding* (MOU). Namun demikian, keterlibatan sektor swasta ini masih terbatas pada aspek promosi wisata dan belum berkembang ke arah dukungan substantif seperti pendanaan atau pengembangan fasilitas objek wisata.

Pada indikator mendorong partisipasi masyarakat lokal, temuan lapangan menunjukkan pemberdayaan masyarakat juga masih terbatas. Partisipasi masyarakat Desa Dayu hingga saat penelitian dilakukan baru sebatas

keterlibatan sebagai pedagang, pelaku umkm, penjaga parkir, dan pelaku kesenian Tari Purba. Program pelatihan pemandu wisata lokal yang telah dirintis MCB tidak berlanjut secara konsisten akibat minimnya tindak lanjut dari masyarakat.

Secara keseluruhan, peran *stakeholders* sebagai akselerator dalam pengembangan objek wisata Museum Dayu belum berjalan efektif dan optimal pada kedua indikatornya. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada minimnya minat masyarakat lokal untuk membuka usaha di kawasan objek wisata, sehingga menciptakan lingkaran permasalahan yang saling memperlemah.

Faktor Pendorong dan Penghambat Peran *Stakeholders*

A. Faktor Pendorong

Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi tiga faktor pendorong peran *stakeholders* dalam pengembangan Museum Dayu, yaitu sebagai berikut:

Pertama, komitmen kelembagaan antar *stakeholders* merupakan faktor pendorong internal. Komitmen ini tercermin secara konkret dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara MCB dan Disparpora Kabupaten Karanganyar yang menjadi landasan hukum bagi operasional bersama dengan pembagian peran yang

jelas. Mekanisme bagi hasil tiket masuk sebesar 60:40 (Disarpورا:MCB) yang dijalankan secara konsisten, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berkala setiap tiga bulan mencerminkan internalisasi tanggung jawab dan akuntabilitas yang baik di antara para *stakeholders*.

Kedua, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah merupakan faktor pendorong eksternal. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata secara eksplisit menetapkan kawasan Museum Dayu sebagai KSPK, sehingga memberikan legitimasi formal bagi pengembangan kawasan. Regulasi ini juga mendorong terjalinnya sinergi lintas instansi dalam pengelolaan objek wisata.

Ketiga, pengakuan dan legitimasi kelembagaan dari institusi resmi merupakan faktor pendorong eksternal yang signifikan. Status Museum Dayu sebagai cagar budaya nasional dan bagian dari Warisan Budaya Dunia UNESCO memberikan tekanan positif bagi para *stakeholders* untuk mempertahankan standar pengelolaan yang tinggi, mengingat adanya mekanisme *review* UNESCO setiap empat hingga lima tahun sekali. Dukungan dari lembaga-lembaga bereputasi seperti Kemenparekraf,

ASHITA, dan PHRI juga memperluas jangkauan legitimasi objek wisata secara tidak langsung.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang teridentifikasi dalam penelitian ini meliputi dua faktor internal dan dua faktor eksternal.

Pertama, keterbatasan inovasi dan inisiatif SDM pengelola objek wisata merupakan faktor penghambat internal. Temuan lapangan menemukan bahwa promosi digital yang dilaksanakan oleh MCB dan Disarpورا belum berjalan secara konsisten dan masif, terbukti dari pengakuan wisatawan yang mengetahui keberadaan Museum Dayu bukan melalui media sosial. Selain itu, inovasi layanan yang tersedia seperti *e-catalog* berbasis *QR code* tidak tersosialisasikan kepada wisatawan, sehingga potensi manfaatnya tidak dapat dirasakan secara optimal.

Kedua, keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan event dan promosi wisata merupakan faktor penghambat internal. Kondisi Museum Dayu yang telah berdiri lebih dari 12 tahun memerlukan revitalisasi besar yang terkendala belum turunnya anggaran pemerintah meskipun telah diajukan sejak tahun 2023. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya event wisata yang dapat

diselenggarakan sebagai instrumen peningkatan kunjungan wisatawan.

Ketiga, rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam ekosistem pariwisata Museum Dayu merupakan faktor penghambat eksternal. Partisipasi masyarakat Desa Dayu masih terbatas sebagai pedagang, pelaku umkm, dan pelaku kesenian, belum menyentuh ranah pengelolaan wisata secara langsung. Kondisi ini diperparah oleh lingkaran permasalahan yang saling memperlemah: sepi pengunjung membuat masyarakat enggan membuka usaha di kawasan objek wisata, dan minimnya fasilitas penunjang membuat kawasan semakin kurang menarik bagi wisatawan.

Keempat, rendahnya keterlibatan aktif sektor swasta merupakan faktor penghambat eksternal. Kerja sama dengan PHRI Karanganyar baru berupa promosi wisata dan kerjasama dengan PT. Sinergi Colomadu juga baru dimulai pada Agustus 2025 dan masih terbatas pada aspek promosi wisata, dan belum berkembang ke dukungan yang lebih substantif seperti pendanaan/pembiayaan kegiatan maupun pengembangan fasilitas. Perubahan status kelembagaan MCB menjadi BLU sejak tahun 2023 yang mengharuskan Museum Dayu mencari sponsor secara mandiri juga menjadi tantangan tersendiri mengingat kapasitas yang dimiliki masih terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu di Kabupaten Karanganyar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu melibatkan empat belas *stakeholders* yang menjalankan lima peran berdasarkan teori Nugroho (2014). Peran *policy creator* dan koordinator dijalankan oleh MCB sebagai *leading sector* bersama Disparpora Kabupaten Karanganyar, mencakup perumusan regulasi, penetapan zonasi kawasan, penentuan kompensasi, serta penyelenggaraan forum koordinasi dan monitoring evaluasi secara berkala. Peran fasilitator dijalankan oleh MCB sebagai fasilitator utama didukung Disparpora dan DLH Kabupaten Karanganyar, meskipun peran DLH ditemukan belum berjalan efektif sesuai PKS. Peran implementator dijalankan dominan oleh MCB melalui Unit Klaster Museum Dayu, mencakup pengelolaan operasional, dokumentasi, hingga pengawasan konstruksi di lokasi objek wisata, namun promosi wisata digital ditemukan belum konsisten dan masif. Peran akselerator dijalankan oleh Pemerintah Desa Dayu, Pokdarwis Dayu, Karang Taruna Desa Dayu, sektor swasta

yakni PT. Sinergi Colomadu dan PHRI Karanganyar, serta masyarakat lokal, namun secara keseluruhan peran ini juga belum berjalan secara optimal.

Kedua, faktor pendorong peran *stakeholders* meliputi: (1) komitmen kelembagaan antar *stakeholders* yang terwujud melalui PKS dan mekanisme monitoring evaluasi berkala sebagai faktor internal; (2) dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah melalui Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 yang menetapkan kawasan Museum Dayu sebagai KSPK; serta (3) pengakuan dan legitimasi kelembagaan dari institusi resmi berupa status cagar budaya nasional dan pengakuan UNESCO, keduanya sebagai faktor eksternal. Adapun faktor penghambat meliputi: (1) keterbatasan inovasi dan inisiatif SDM pengelola; (2) keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan event dan promosi wisata, keduanya sebagai faktor internal; serta (3) rendahnya partisipasi masyarakat; dan (4) rendahnya keterlibatan aktif sektor swasta, keduanya sebagai faktor eksternal.

SARAN

- a. MCB perlu melakukan pemeliharaan fasilitas dasar wisata secara berkala melalui jadwal perawatan yang terdokumentasi, mempercepat pengajuan anggaran revitalisasi

kepada Kementerian Kebudayaan dengan dukungan data kondisi objek yang komprehensif, serta mengoptimalkan status BLU untuk membuka peluang kemitraan pembiayaan dengan sektor swasta. Inovasi layanan yang telah ada, seperti *e-catalog* berbasis QR code, perlu diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam standar operasional pelayanan pengunjung.

- b. Disparpora Kabupaten Karanganyar perlu membangun sinergi dengan Disdikbud Kabupaten Karanganyar melalui program kunjungan edukatif terjadwal bagi peserta didik dari jenjang dasar hingga menengah guna memperluas segmen wisatawan pelajar. Selain itu, perlu diinisiasi penyelenggaraan event tematik berbasis paleontologi dan kebudayaan lokal secara berkala, disertai publikasi konten promosi digital yang konsisten dan terencana di seluruh platform media sosial yang dikelola.
- c. Pemerintah Desa Dayu perlu memberikan pendampingan berkelanjutan kepada Pokdarwis Dayu, Karang Taruna, dan Kelompok Kesenian Tari Purba dalam penyusunan paket wisata budaya terpadu yang mengintegrasikan kunjungan museum, pertunjukan Tari Purba, dan layanan *homestay*. Promosi

homestay di kawasan Museum Dayu perlu didukung melalui pengelolaan media sosial oleh Pokdarwis Dayu guna meningkatkan aksesibilitas informasi bagi wisatawan.

- d. MCB dan Unit Klaster Museum Dayu perlu memperluas intensitas kerja sama dengan sektor swasta/privat melalui penyusunan skema kemitraan yang lebih atraktif yang mencakup penyelenggaraan event bersponsor dan pengembangan produk wisata bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Tim Dap Press Ed. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fisip Universitas Diponegoro*.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153.
- Fatin, D. A., Devina, F., & Musleh, M. (2024). Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 28–47.
- Ginting, G., Kismartini., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2022). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Jurnal PERSPEKTIF*, 11(1), 8–15.
- Jannata, M. F., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Diponegoro*.
- Langrafe, T. D. F., Barakat, S. R., Stocker, F., & Boaventura, J. M. G. (2020). A stakeholder theory approach to creating value in higher education institutions. *The Bottom Line*, 33(4), 297–313.
- Mulyawan, R., Wahjunie, E. D., Ichwandi, I., & Tarigan, S. D. (2022). Kajian Peran Stakeholder Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 198–209.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Penerbit CV. Bildung Nusantara.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pratiwi, P. A., Yuniarti, E., Pratiwi, N. N., Fitriani, I. M., & Septhiani, A. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata Pantai Sungai Kinjil. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 325–341.
- Purbosaputro, E. (2023). Pengaruh Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Berkunjung Serta Dampaknya Terhadap Kepuasan

- Wisatawan di Museum Purbakala Dayu di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 19(1), 24–34.
- Rahmawati, A., & Marom, A. (2024). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Seruling Interactive Zoo Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Diponegoro*.
- Rintawati, A. R., & Santoso, S. (2024). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Diponegoro*.
- Rizaldi, A., Idrus, S., & Masyudi, L. (2025). Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kembang Kuning. *Journal of Responsible Tourism*, 4(3), 871–874.
- Talib, D. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata*.
<https://doi.org/10.31314/Tulip.3.1.12-18.2020>
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Usu, N. F., Lagalo, A. M. S., & Talib, D. (2022). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Embung Dumati Di Kabupaten Gorontalo. *Tulip: Tulisan Ilmiah Pariwisata*, 5(1), 13-19.
- Wahyuningtyas, L., & Iskandar, A. D. (2023). Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, 7(2), 166-178.
- Yakub, P. A., & Haryono, T. (2019). Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga*.
- Yuliandri, R., & Netrawatii, I. G. A. O. (2024). Analisis Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata Di Desa Kuta Lombok. 4(2), 7823-7830.

Dokumen:

- Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Jawa Tengah Agustus 2025.
- Buku *Indonesia Tourism Outlook 2025/2026*
- Kabupaten Karanganyar dalam Angka 2021-2025.
- Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka 2021-2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016–2026.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024-2026.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.